

PEMANTAPAN MODEL PENGEMBANGAN KAWASAN AGRIBISNIS SAYURAN SUMATERA (KASS)

**Saptana
Masjidin Siregar
Sri Wahyuni
Saktyanu K. Dermoredjo
Ening Ariningsih
Valeriana Darwis**



PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
2005

Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pemantapan model pengembangan kawasan
Agribisnis sayuran Sumatera (KASS) / penyusun
Saptana . . . [et al.]. – Bogor : Pusat
Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi
Pertanian, 2005.
232 hlm. ; 24 cm.

ISBN : 979-3566-34-5

1. Sayuran – Aspek ekonomi. I. Saptana.

635

Desain dan Tata Letak :

Agus Suwito

Diterbitkan oleh :

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Departemen Pertanian

Jl. A. Yani No. 70, Bogor

Telp. : (0251) – 333964

Fax. : (0251) – 314496

E-Mail : caser@indosat.net.id

Website : <http://www.pse.litbang.deptan.go.id>

ISBN : No. 979-3566-34-5

Hak Cipta pada penulis. Tidak diperkenankan memproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa seizin tertulis dari penulis.

KATA PENGANTAR

Globalisasi ekonomi yang ditandai dengan semakin terbukanya perdagangan dan investasi mendorong pasar komoditas hortikultura-sayuran semakin terintegrasi baik antar daerah, antar pulau, dan antar negara. Baik dari aspek permintaan pasar maupun potensi produksi maka pengembangan agribisnis sayuran di Kawasan Agribisnis Sayuran/Hortikultura Sumatera (KASS/KAHS) strategis untuk mendapatkan prioritas pengembangannya. Sejalan dengan kondisi di atas, dalam tahun anggaran 2004 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian melakukan penelitian "Pemantapan Model Pengembangan Kawasan Agribisnis Sayuran Sumatera (KASS)", yang dicetak dalam bentuk buku.

Peta permintaan sayuran untuk kebutuhan domestik memberikan beberapa gambaran sebagai berikut: (1) Sebagian sayuran yang dihasilkan di daerah sentra produksi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagian besar (92-95%) untuk konsumsi rumah tangga, yang mereka akses lewat pasar-pasar tradisional, dan hanya sebagian kecil yang melalui pasar swalayan. Untuk Provinsi Riau yang merupakan sentra konsumsi banyak mendatangkan sayuran dari Sumatera Daratan sebagian ada yang diperdagangkan untuk domestik (60 - 70%) dan ekspor (30 - 40%). Untuk provinsi sentra produksi seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat peran konsumen institusi seperti hotel, restoran, rumah makan, serta rumah sakit ternyata relatif kecil (2 - 8%), sementara di daerah tujuan pasar Provinsi Riau peran konsumen institusi diperkirakan bisa mencapai 2 - 3 kali lipat (5 - 20%), karena banyaknya jumlah hotel, restoran, rumah makan, serta rumah sakit.

Produksi sayuran Kawasan KASS/KAHS terkonsentrasi pada sayuran dataran tinggi di kawasan Bukit Barisan, seperti di Sumatera Utara terkonsentrasi di Karo, Deli Serdang, dan Simalungun, sedangkan Sumatera Barat terkonsentrasi di Kabupaten Solok, Tanah Datar, serta Agam. Sementara itu, Provinsi Riau hanya menghasilkan sayuran dataran rendah, khususnya sayuran berdaun lebar. Untuk total luas tanaman sayuran Kabupaten Karo, Rejang Lebong, Simalungun dan Deli Serdang berturut-turut menduduki peringkat 1 sampai 4. Meskipun Kabupaten Karo menduduki peringkat pertama, pertumbuhan luas tanaman sayuran di kabupaten ini hanya 3,3 persen/tahun, jauh di bawah pertumbuhan luas sayuran di Rejang Lebong (26,6%/th) dan Simalungun (52,35%/th). Besar kemungkinan posisi Kabupaten Karo sebagai daerah sentra produksi utama sayuran tergeser oleh Rejang Lebong dan Simalungun. Dari sisi efisiensi produksi nampaknya Sumatera Utara memiliki keunggulan baik terhadap Sumatera Barat maupun terhadap Riau. Namun Sumatera Barat secara sporadis masih memiliki potensi keunggulan untuk menghasilkan cabe merah, tomat, kubis lokal (Kubis Singgalang), serta kentang lokal (Batang Hitam). Sementara itu, Provinsi Riau memiliki keunggulan dalam menghasilkan cabe merah dan sayuran

berdaun lebar, karena aksesnya yang lebih dekat dengan tujuan pasar ekspor Singapura dan Malaysia.

Pemantapan Model Kelembagaan Forum KASS/KAHS dapat dilakukan sebagai Lembaga Fasilitasi, Mediasi, dan Sumber Rujukan. Di samping itu, model pengembangan agribisnis sayuran di Kawasan KASS/KAHS ke depan dapat dilakukan dengan pengintegrasian antara kelembagaan KASS/KAHS dengan Program Agropolitan dengan mendukkan peran dan fungsi kelembagaan komunitas lokal-kelompok tani, kelembagaan ekonomi-pelaku agribisnis, dan kelembagaan pemerintah melalui sistem koordinasi yang harmonis melalui kelembagaan Forum KASS/KAHS.

Dengan selesainya buku ini, kami menyampaikan terima kasih kepada jajaran Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau; Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di tiga provinsi contoh; Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pariwisata di kabupaten/kota contoh; serta pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Elianor Sembiring yang telah mendampingi kami dalam pelaksanaan penelitian. Semoga buku ini bermanfaat bagi Pengambil Kebijakan, khususnya Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil dan Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura; para pelaku agribisnis, serta semua pihak yang berkepentingan.

Bogor, Juli 2005

Kepala Pusat,

Dr. Pantjar Simatupang
NIP. 080 036 924

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 PENDAHULUAN.....	 1
Latar Belakang.....	1
Perumusan Masalah	2
Justifikasi	3
Tujuan Penulisan.....	4
 TINJAUAN PUSTAKA	 6
Tinjauan Teoritis Teori Penawaran dan Permintaan Serta Tataniaga	6
Keragaan Permintaan Komoditas Sayuran.....	7
Preferensi Konsumen.....	8
Sistem Pemasaran Komoditas Sayuran.....	8
Perkembangan Harga.....	13
Integrasi Pasar	14
Status Komoditas Sayuran: Keunggulan Komparatif dan Kompetitif	16
Kinerja Program Pengembangan Agribisnis Sayuran	20
 METODE PENELITIAN.....	 22
Kerangka Pemikiran.....	22
Lokasi Penelitian dan Sampling	25
Analisis Data dan Jenis Data	27
 EKONOMI SAYURAN	 33
Penawaran Komoditas Sayuran	33
Trend Luas Areal Panen dan Produksi Sayuran	37
Kajian Aspek Produksi Komoditas Sayuran	43
 GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KESESUAIAN LAHAN	 44
Provinsi Sumatera Utara.....	44
Provinsi Sumatera Barat.....	50
Provinsi Riau.....	54
Klasifikasi Kesesuaian Lahan	58

PETA PERMINTAAN KOMODITAS SAYURAN DI KAWASAN AGRIBISNIS SAYURAN/HORTIKULTURA SUMATERA	65
Permintaan untuk Konsumen Rumah Tangga	65
Kawasan Sentra Konsumsi Sayuran di Kawasan KASS	73
Permintaan untuk Konsumen Institusi (Rumah Sakit, Hotel, dan Restoran/Rumah Makan)	82
Standar Mutu Menurut Preferensi Konsumen	98
 PETA PRODUKSI DAN MANAGEMEN PRODUKSI SAYURAN DI KAWASAN AGRIBISNIS SAYURAN ATAU HORTIKULTURA SUMATERA.....	101
Sentra Produksi Sayuran di Kawasan Agribisnis Sumatera...	101
Struktur Penggunaan Lahan di Wilayah KASS/KAHS	110
Kinerja Usahatani Komoditas Sayuran di Kawasan Agribisnis Sayuran Sumatera.....	113
 PETA PERDAGANGAN DAN ARAH PENGEMBANGAN PEMASARAN SAYURAN DI WILAYAH KASS	128
Peta Perdagangan Kawasan Sumatera Utara	128
Peta Perdagangan Kawasan Sumatera Barat	143
Peta Perdagangan Kawasan Riau	151
Arah Pengembangan Sistem Pemasaran di Wilayah KASS....	157
 PEMANTAPAN MODEL KELEMBAGAAN KAWASAN AGRIBISNIS SAYURAN/HORTIKULTURA SUMATERA (KASS/KAHS)	159
Kelembagaan Forum KASS/KAHS	159
Pemantapan Model Pengembangan Kelembagaan Forum KASS/KAHS.....	161
Model Kelembagaan di Tingkat Petani dalam Pengembangan Agribisnis Sayuran di Kawasan KASS/KAHS.....	177
 KESIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKAN	185
Kesimpulan.....	185
Saran Kebijakan	189
 DAFTAR PUSTAKA.....	192

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Biaya dan Keuntungan Finansial dan Sosial Komoditas Sayuran di Jawa Tengah dan Sumatera Utara, 2000/2001..	17
2. Koefisien Matrik Analisis Kebijakan (PAM) Komoditas Sayuran di Jawa Tengah dan Sumatera Utara, 2000/2001..	20
3. Distribusi Jumlah Contoh Menurut Kategori Contoh untuk Judul Kegiatan Analisis Peta Permintaan dan Perdagangan Sayuran Kawasan KASS di Masing-masing Lokasi Penelitian	28
4. Distribusi Jumlah Contoh Menurut Kategori Contoh untuk Judul Kegiatan Analisis Peta Produksi Sayuran di Kawasan KASS di Masing-masing Lokasi Penelitian	29
5. Peta Pangsa Luas Panen Tanaman Sayuran di Indonesia Tahun 2002 (%)	34
6. Perkembangan Rata-rata Luas Panen dan Pertumbuhannya Pada Beberapa Komoditas Sayuran di Indonesia.....	35
7. Perkembangan Produksi Sayuran di Beberapa Negara Selama Tiga Tahun Terakhir.....	36
8. Perkembangan Luas Areal Panen Sayuran Menurut Jenis, Tahun, 1986-2002	38
9. Perkembangan Produksi Sayuran Menurut Jenis di Indonesia, Tahun 1986-2002 (Ton).....	39
10. Perkembangan Ekspor Sayuran di Beberapa Negara Selama Tiga Tahun Terakhir.....	40
11. Perkembangan Impor Sayuran di Beberapa Negara Selama Tiga Tahun Terakhir.....	40
12. Konsumsi Sayuran Rata-Rata Per Kapita Seminggu Tahun 1990, 1996 dan 2002.....	42
13. Dugaan Elastisitas Harga Sendiri dan Silang Atas Permintaan Komoditas Sayuran	43
14. Letak di Atas Permukaan Laut, Luas Daerah, Letak Geografis Menurut Kabupaten dan Kota.....	44

15.	Ketinggian Dari Permukaan Laut, Rata-Rata Kelembaban Udara, Curah Hujan, Penyinaran Matahari, Kecepatan Angin dan Penguapan Menurut Stasiun Tahun 2000.....	45
16.	Klasifikasi Daerah Sumatera Utara Menurut Ketinggian Tempat dari Permukaan Laut	46
17.	Luas Wilayah Menurut Tingkat Kemiringan di Provinsi Sumatera Utara	46
18.	Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2001	47
19.	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayuran Utama Sumatera Utara, Tahun 1990 dan 1999.	49
20.	Wilayah Pengembangan Sayuran di Provinsi Sumatera Utara	50
21.	Luas Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Kemiringan Lereng di Sumatera Barat	53
22.	Produksi Sayuran di Lokasi Pengembangan Kawasan Agribisnis Sayuran Sumatera (KASS) Tahun 2001 Terhitung Posisi Akhir Desember 2003	57
23.	Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Field Day Sosialisasi Buku Teknologi Sayur Organik di Lokasi KASS Tahun 2003.	57
24.	Kesesuaian Lahan untuk Usahatani Komoditas Kentang (<i>Solanum tuberosum L.</i>)	60
25.	Kesesuaian Lahan untuk Usahatani Komoditas Kubis (<i>Brassica oleraceaL.</i>)	61
26.	Kesesuaian Lahan untuk Usahatani Komoditas Cabai Merah (<i>Capsicum annuum.</i>)	62
27.	Kesesuaian Lahan untuk Usahatani Komoditas Tomat Buah (<i>Solanum lycopersicon esculentum MILL.</i>)	63
28.	Kesesuaian Lahan untuk Usahatani Komoditas Tomat Sayur (<i>Solanum lycopersicon eslentum MILL.</i>).....	64
29.	Tingkat Konsumsi Sayuran Menurut Provinsi di Sumatera, 1996 dan 2002 (Kg/Kap/Th).....	66
30.	Tingkat Konsumsi Kentang Menurut Provinsi di Sumatera, 1996 dan 2002 (Kg/Kap/Th).....	67

31.	Tingkat Konsumsi Kubis Menurut Provinsi di Sumatera, 1996 dan 2002 (Kg/Kap/Th).....	69
32.	Tingkat Konsumsi Cabe Merah Menurut Provinsi di Sumatera, 1996 dan 2002 (Kg/Kap/Th)	70
33.	Tingkat Konsumsi Tomat Menurut Provinsi di Sumatera, 1996 dan 2002 (Kg/Kap/Th).....	72
34.	Rataan Konsumsi dan Pangsa Konsumsi Sayuran Menurut Kabupaten di Sumatera, 2002	74
35.	Konsumsi, Pangsa Konsumsi Kentang dan Total Sayuran Serta Indeks Spesialisasi Konsumsi Kentang Menurut Kabupaten di Sumatera, 2002	75
36.	Konsumsi, Pangsa Konsumsi Kubis dan Total Sayuran, Serta Indeks Spesialisasi Konsumsi Kubis Menurut Kabupaten di Sumatera, 2002	77
37.	Konsumsi, Pangsa Konsumsi Cabe Merah dan Total Sayuran Serta Indeks Spesialisasi Konsumsi Cabe Merah Menurut Kabupaten di Sumatera, 2002	79
38.	Konsumsi, Pangsa Konsumsi Tomat dan Total Sayuran Serta Indeks Spesialisasi Konsumsi Tomat Menurut Kabupaten di Sumatera, 2002	81
39.	Persentase (%) Penghunian Kamar Hotel Berbintang dan Non Bintang di Provinsi Sumatera Utara	82
40.	Persentase (%) Tingkat Penghunian Kamar dan Tempat Tidur Hotel di Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2002	83
41.	Rata-rata Lama Menginap (Hari) di Hotel di Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2002	83
42.	Persentase (%) Tamu Mancanegara dan Tamu Nusantara.....	83
43.	Keragaan Konsumen Institusi Hotel, Restoran/Rumah Makan, Rumah Sakit, dan Perkiraan Kebutuhan Sayur Per Tahun di Kabupaten Karo, Tahun 2002	84
44.	Keragaan Konsumen Institusi Hotel, Restoran/Rumah Makan, Rumah Sakit, dan Perkiraan Kebutuhan Sayur Per Tahun di Kabupaten Agam, Tahun 2002	87
45.	Keragaan Konsumen Institusi Hotel, Restoran/Rumah Makan, Rumah Sakit, dan Perkiraan Kebutuhan Sayur Per Tahun di Kota Bukit Tinggi, Tahun 2002	89

46.	Keragaan Konsumen Institusi Hotel, Restoran/Rumah Makan, Rumah Sakit, dan Perkiraan Kebutuhan Sayur Per Tahun di Kota Pekan Baru, Tahun 2002	91
47.	Keragaan Konsumen Institusi Hotel, Restoran/Rumah Makan, Rumah Sakit, dan Perkiraan Kebutuhan Sayur Pertahun di Kota Batam, Tahun 2002	93
48.	Pengadaan/Pembelian Sayuran RSUD Pekanbaru Juli 2003-Juni 2004	95
49.	Perkembangan Harga Pembelian Sayuran Selama Satu Tahun Terakhir di RSUD Pekanbaru	95
50.	Kualifikasi Sayuran yang Diinginkan RS Awal Bros	96
51.	Pemakaian Sayuran Bulan Juli 2004 di RS Awal Bros	97
52.	Pemakaian Sayuran di RSUD Bangkinang, Kabupaten Kampar Bulan Agustus 2004.....	98
53.	Pangsa Rataan Luas dan Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten di Sumatera, 1998 – 2000.....	101
54.	Pangsa Luas Tanaman Kentang dan Sayuran Serta Indeks Spesialisasi Kentang Menurut Kabupaten di Sumatera, 1998-2002	103
55.	Rataan Luas, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Kentang Menurut Kabupaten Penghasil Kentang, 1998-2002	103
56.	Pangsa Luas Tanaman Kubis dan Sayuran serta Indeks Spesialisasi Kubis Menurut Kabupaten di Sumatera, 1998-2002	104
57.	Rataan Luas, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Kubis Menurut Kabupaten Penghasil Kubis, 1998-2002	105
58.	Pangsa Luas Tanaman Cabe dan Sayuran Serta Indeks Spesialisasi Cabe Menurut Kabupaten di Sumatera, 1998-2002	106
59.	Rataan Luas, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Cabe di Sumatera Menurut Kabupaten Penghasil Cabe, 1998-2002 ..	107
60.	Pangsa Luas Tanaman Tomat dan Sayuran Serta Indeks Spesialisasi Tomat Menurut Kabupaten di Sumatera, 1998-2002	108
61.	Rataan Luas, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Tomat Di Sumatera Menurut Kabupaten Penghasil Tomat, 1998-2002 ..	109

62.	Rata-rata luas Penguasaan/Penggarapan Lahan Pertanian Dataran Tinggi Menurut Jenis Komoditas yang Diolahkan (Ha), di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Tahun 2003-2004	110
63.	Rata-rata luas Penguasaan/Penggarapan Lahan Pertanian Dataran Tinggi Menurut Jenis Komoditas yang Diolahkan (Ha), di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Tahun 2003-2004	111
64.	Rata-rata luas Penguasaan/Penggarapan Lahan Pertanian Dataran Rendah untuk Komoditas Cabe Merah (Ha), di Kabupaten Kampar, Riau, Tahun 2003-2004	113
65.	Analisis Biaya dan Pendapatan Usahatani Kentang (Per Hektar), di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Tahun 2004	114
66.	Analisis Biaya dan Pendapatan Usahatani Kubis (Per Hektar), di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Tahun 2004	116
67.	Analisis Biaya dan pendapatan Usahatani Cabe Merah (Per Hektar), di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Tahun 2004.	117
68.	Analisis Biaya dan Pendapatan Usahatani Tomat (Per Hektar), di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Tahun 2004	118
69.	Analisis Biaya dan pendapatan Usahatani Kentang (Per Hektar), di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Tahun 2004	120
70.	Analisis Biaya dan Pendapatan Usahatani Kubis (Per Hektar), di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Tahun 2004	122
71.	Analisis Biaya dan Pendapatan Usahatani Cabe Merah (Per Hektar), di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Tahun 2004	123
72.	Analisis Biaya dan Pendapatan Usahatani Tomat (Per Hektar), di Kabupaten Sumatera Barat, Tahun 2004	125
73.	Analisis Biaya dan Pendapatan Usahatani Cabe Merah (Per Hektar), di Kabupaten Kampar, Riau, Tahun 2004.....	127
74.	Perkembangan Impor Singapura Terhadap Sayur-sayuran, Tahun 2001-2003 (Nilai dalam Ribu Sin Dolar).....	170
75.	Perbandingan Karakteristik Aspek Kelembagaan dan Aspek Keorganisasian Secara Diametral	181

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Permintaan dan Penawaran Turunan Serta Margin Tataniaga	7
2. Diagram Alir Kerangka Pikir Studi Pemantapan Model Pengembangan Kawasan Agribisnis Sayuran/Hortikultura Sumatera (KASS/KAHS)	26
3. Saluran Pemasaran untuk Komoditas Kentang Tujuan Lokal, Regional, dan Ekspor di Provinsi Riau, Tahun 2004.....	129
4. Saluran Pemasaran Kubis di Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2004	130
5. Saluran Pemasaran Komoditas Cabai Merah dan Tomat untuk Tujuan Pasar Lokal	131
6. Fluktuasi Harga Tingkat Produsen Menurut Variasi Antart-Bulan di Sumut	134
7. Fluktuasi Harga Tingkat Produsen Menurut Variasi Kabupaten di Sumut.....	136
8. Fluktuasi Harga Tingkat Eceran Menurut Variasi Mingguan di Pasar Pusat Medan	137
9. Fluktuasi Harga Tingkat Eceran Menurut Variasi Mingguan di Pasar Pusat Karo	139
10. Rantai Pemasaran Komoditas Kentang dan Kubis Asal Daerah Sentra Produksi Kabupaten Agam di Sumatera Barat Tahun 2004	143
11. Rantai Pemasaran Komoditas Cabe Merah dan Tomat Asal Daerah Sentra Produksi Kabupaten Agam Sumatera Barat...	144
12. Fluktuasi Harga Tingkat Produsen Menurut Variasi Antart-Kabupaten di Sumatera Barat, Tahun 2003.....	147
13. Fluktuasi Harga Tingkat Eceran Menurut Variasi Antart-Kabupaten di Sumatera Barat, Tahun 2003.....	149
14. Fluktuasi Harga Tingkat Produsen Menurut Variasi Antart-Kabupaten di Riau.....	154

15.	Fluktuasi Harga Tingkat Eceran Menurut Variasi Antar Kabupaten di Riau	155
16.	Pengembangan Kawasan Agribisnis Hortikultura Sumatera..	157
17.	Peran dan Fungsi Kelembagaan Forum KASS/KAHS	162
18.	Model Pengembangan Kluster Agribisnis Hortikultura	163
19.	Kerangka Model Kelembagaan Forum KASS/KAHS Sebagai Lembaga Fasilitator, Mediator dan Sumber Rujukan (diadopsi dari Irawan, 2004)	165
20.	Kerangka Pemikiran Integrasi Kelembagaan Program KASS dan Program Agropolitan dalam Rangka Pengembangan Agribisnis Sayuran di Kawasan KASS.....	174

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Gambar	
1. Peta Provinsi Sumatera Menurut Kabupaten, 1999	197
2. Peta Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten, 2002	198
3. Peta Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten, 2002	199
4. Peta Provinsi Riau Menurut Kabupaten, 2002	200
5. Indeks Spesialisasi Konsumsi Sayuran Kentang di Kawasan Sumatera, 2002	201
6. Indeks Spesialisasi Konsumsi Sayuran Kubis di Kawasan Sumatera, 2002	202
7. Indeks Spesialisasi Konsumsi Sayuran Cabe Merah di Kawasan Sumatera, 2002	203
8. Indeks Spesialisasi Konsumsi Sayuran Tomat di Kawasan Sumatera, 2002	204
9. Indeks Spesialisasi Konsumsi Sayuran Kentang di Provinsi Sumatera Utara, 2002	205
10. Indeks Spesialisasi Konsumsi Sayuran Kubis di Provinsi Sumatera Utara, 2002	206
11. Indeks Spesialisasi Konsumsi Sayuran Cabe Merah di Provinsi Sumatera Utara, 2002	207
12. Indeks Spesialisasi Konsumsi Sayuran Tomat di Provinsi Sumatera Utara, 2002	208
13. Indeks Spesialisasi Konsumsi Sayuran Kentang di Provinsi Sumatera Barat, 2002	209
14. Indeks Spesialisasi Konsumsi Sayuran Kubis di Provinsi Sumatera Barat, 2002	210
15. Indeks Spesialisasi Konsumsi Sayuran Cabe Merah di Provinsi Sumatera Barat, 2002	211
16. Indeks Spesialisasi Konsumsi Sayuran Tomat di Provinsi Sumatera Barat, 2002	212

17.	Indeks Spesialisasi Konsumsi Sayuran Kentang di Provinsi Riau, 2002	213
18.	Indeks Spesialisasi Konsumsi Sayuran Kubis di Provinsi Riau, 2002	214
19.	Indeks Spesialisasi Konsumsi Sayuran Cabe Merah di Provinsi Riau, 2002	215
20.	Indeks Spesialisasi Konsumsi Sayuran Tomat di Provinsi Riau, 2002	216
21.	Indeks Spesialisasi Luas Tanaman Kentang di Kawasan Sumatera, 2002	217
22.	Indeks Spesialisasi Luas Tanaman Kubis di Kawasan Sumatera, 2002	218
23.	Indeks Spesialisasi Luas Tanaman Cabe Merah di Kawasan Sumatera, 2002	219
24.	Indeks Spesialisasi Luas Tanaman Tomat di Kawasan Sumatera, 2002	220
25.	Indeks Spesialisasi Luas Tanaman Kentang di Provinsi Sumatera Utara, 2002	221
26.	Indeks Spesialisasi Luas Tanaman Kubis di Provinsi Sumatera Utara, 2002	222
27.	Indeks Spesialisasi Luas Tanaman Cabe Merah di Provinsi Sumatera Utara, 2002	223
28.	Indeks Spesialisasi Luas Tanaman Tomat di Provinsi Sumatera Utara, 2002	224
29.	Indeks Spesialisasi Luas Tanaman Kentang di Provinsi Sumatera Barat, 2002	225
30.	Indeks Spesialisasi Luas Tanaman Kubis di Provinsi Sumatera Barat, 2002	226
31.	Indeks Spesialisasi Luas Tanaman Cabe Merah di Provinsi Sumatera Barat, 2002	227
32.	Indeks Spesialisasi Luas Tanaman Tomat di Provinsi Sumatera Barat, 2002	228

33.	Indeks Spesialisasi Luas Tanaman Kentang di Provinsi Riau, 2002	229
34.	Indeks Spesialisasi Luas Tanaman Kubis di Provinsi Riau, 2002	230
35.	Indeks Spesialisasi Luas Tanaman Cabe Merah di Provinsi Riau, 2002	231
36.	Indeks Spesialisasi Luas Tanaman Tomat di Provinsi Riau, 2002	232

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Era globalisasi yang diawali oleh liberalisasi sistem moneter dunia dengan runtuhnya sistem nilai tukar tetap Bretton Woods pada tahun 1973 (Argy, 1981 dalam Simatupang, 1995), diperkuat oleh deregulasi perdagangan dan investasi internasional dalam naungan GATT yang disepakati pada tahun 1994, dan didorong kuat terjadinya revolusi teknologi telekomunikasi, transportasi, dan turisme, sehingga arus globalisasi telah masuk dengan kuat dan cepat ke seluruh negara di dunia ini (Ohmae, 1995; Kuntjoro-Jakti, 1995; dan Simatupang, 1995). Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan semakin terintegrasinya berbagai aspek perekonomian suatu negara dengan perekonomian dunia.

Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, terjadi berbagai perubahan pada kelembagaan pemerintahan di tingkat kabupaten. Dalam pasal 10 ayat 1, daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan desentralisasi tersebut diperkirakan akan mendorong setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten, untuk memproduksi berbagai komoditas pertanian dalam kerangka swasembada di tingkat daerah, atau paling tidak mengurangi ketergantungan terhadap daerah lain. Kebijakan semacam ini bisa menjadi tidak menguntungkan baik ditinjau dari penggunaan sumberdaya domestik maupun perdagangan antar wilayah.

Dari segi produksi atau penawaran, komoditas sayuran yang secara intrinsik memiliki sifat cepat busuk, mudah rusak, dan susut yang besar merupakan masalah yang dapat menimbulkan risiko fisik dan harga yang dihadapi pelaku agribisnis sayuran. Kenyataan ketertinggalan dalam aplikasi dan pengembangan teknologi baik teknologi pembibitan, produksi, maupun penanganan pasca panen merupakan tantangan tersendiri. Secara regional sulit diciptakan keseimbangan antara produksi atau penawaran yang dihasilkan di sentra-sentra produksi dengan permintaan di pusat-pusat konsumsi, sehingga harga sayuran cenderung sangat fluktuatif.

Sejalan dengan globalisasi perekonomian dan otonomi daerah tersebut terjadi pula perubahan besar pada preferensi konsumen terhadap produk-produk pertanian, termasuk produk hortikultura. Simatupang (1995) mengemukakan kalau dulu (tradisional), atribut utama yang mencirikan preferensi konsumen hanyalah: jenis, kenyamanan, stabilitas harga dan nilai komoditi, maka dewasa ini konsumen telah pula menuntut tambahan atribut yang lebih rinci, seperti: kualitas (komposisi bahan baku), kandungan nutrisi (lemak, kalori, protein, kolesterol, dan sebagainya), dan aspek lingkungan (apakah produk tersebut dihasilkan

dengan usahatani dan proses pengolahan produk yang tidak mengganggu kualitas dan kelestarian lingkungan). Dapat dikatakan bahwa dewasa ini konsumen tidak membeli komoditi tetapi membeli produk.

Ditinjau dari aspek permintaan, prospek permintaan domestik terus meningkat baik dalam bentuk konsumsi segar maupun olahan, sebagai akibat dari peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta berkembangnya pusat industri dan pariwisata. Sementara itu, dari ditinjau dari aspek produksi, potensi pengembangan komoditas hortikultura masih terus dapat ditingkatkan baik dari aspek ketersediaan lahan maupun teknologi budidaya, pasca panen, maupun pengolahannya. Potensi lahan untuk pengembangan komoditas hortikultura mencakup lahan pekarangan seluas 5,33 juta ha, lahan tegalan/huma 11,61 juta ha, lahan sementara tidak diusahakan seluas 7,58 juta ha, dan lahan untuk kayu-kayuan seluas 9,13 juta ha (BPS, 1999, hasil identifikasi Ditjenhort, 2001).

Ciri-ciri sistem produksi hortikultura sayuran, tanaman hias, dan tanaman obat adalah sebagai berikut: (1) skala usaha dan penggunaan modal kecil, (2) penerapan teknologi usahatani belum optimal, (3) penggunaan pestisida untuk pembrantasan hama dan penyakit cenderung berlebih (overdosis), (4) kurang tersedianya bibit bermutu, sehingga mempengaruhi mutu bahan baku dan produk yang dihasilkan, (5) penataan produksi belum berdasarkan pada keseimbangan antara supply dan demand, dan (6) pemasaran hasil belum efisien, harga lebih banyak ditentukan oleh pedagang. Sementara itu, hasil evaluasi KASS (Ditjenhort, 2002) masih dijumpai permasalahan pokok di luar produksi seperti kehilangan hasil pasca panen yang tinggi dan adanya kerusakan hasil dalam distribusi dan pemasaran hasil.

Akibat dari sistem produksi seperti tersebut adalah belum dapat dicapainya produktivitas dan kualitas yang standar, produksi bersifat musiman, harga sangat fluktuatif, dan keamanan pangan produk sayuran kurang terjamin. Belum ditanganinya kegiatan pasca panen dan distribusi secara baik juga berakibat produk cepat rusak dan tingkat kehilangan hasil tinggi. Kebijakan pemerintah ke arah penyediaan infrastruktur pasar yang memadai sangat menunjang pengembangan komoditas sayuran di Kawasan Agribisnis Sayuran/Hortikultura Sumatera (KASS/KAHS).

Perumusan Masalah

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan agribisnis komoditas hortikultura, khususnya di sentra-sentra produksi sayuran Indonesia terutama adalah belum terwujudnya ragam, kualitas, kesinambungan pasokan, dan kuantitas yang sesuai dengan permintaan pasar atau preferensi konsumen. Hal tersebut berkaitan dengan beberapa permasalahan dan kendala pokok sebagai berikut: (1) Pola pemilikan lahan yang sempit dan tersebar, tiadanya sistem pengwilayah pengembangan, dan sistem usahatani yang bersifat sporadis; (2) Lemahnya

permodalan petani, karena kegiatan budidaya, pasca panen, dan distribusi produk hortikultura tergolong padat modal dan siklus perputaran modal yang cepat; (3) Rendahnya penguasaan teknologi yang dikuasai petani baik dari aspek pembibitan, budidaya, maupun kegiatan penanganan pasca panen menyebabkan produktivitas dan kualitas produk belum standar; (4) Tidak adanya keseimbangan antara produksi sayuran di daerah sentra produksi dengan permintaan di pusat-pusat konsumsi; (5) Harga produk hortikultura sangat fluktuatif baik akibat panen yang bersifat musiman, sifat intrinsik komoditas hortikultura yang mudah busuk atau rusak, dan penanganan pasca panen yang belum prima; (6) Pemasaran produk yang belum efisien, bagian keuntungan yang diterima petani relatif rendah, adanya margin ganda, serta adanya rantai tataniaga yang cukup panjang; (7) Kebijaksanaan dan strategi pemerintah yang kurang kondusif sehingga petani dan para pelaku tataniaga mengalami disinsentif; dan (8) Kebijaksanaan pemerintah daerah yang cenderung memproduksi berbagai komoditas sayuran untuk tujuan swasembada atau pada daerah lain, kurang menguntungkan dari segi pembangunan ekonomi wilayah.

Justifikasi

Mengacu pada perubahan lingkungan strategis, adanya arus globalisasi-liberalisasi ekonomi, otonomi daerah, dan perubahan preferensi konsumen, serta tuntutan masyarakat dunia akan produk yang aman dikonsumsi, pasar komoditas hortikultura akan semakin dinamis. Hal tersebut mempunyai implikasi bahwa apabila kita ingin tetap eksis dalam pasar maka faktor-faktor determinan yang merupakan pengendali dinamika tersebut harus dapat dipahami, dijabarkan, dan digunakan sebagai input yang harus dimanfaatkan dalam menyusun perencanaan program pembangunan pertanian, khususnya pengembangan komoditas sayuran di kawasan KASS/KAHS.

Pada sektor agribisnis hortikultura, setiap kegiatan agribisnis mulai dari kegiatan pengadaan sarana produksi, kegiatan produksi, hingga kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil, serta kegiatan jasa penunjang umumnya dilakukan oleh pelaku agribisnis yang berbeda. Simatupang (1995) mengemukakan bahwa struktur agribisnis yang berkembang saat ini dapat digolongkan sebagai tipe dispersal atau tersekat-sekat. Struktur agribisnis demikian kurang memiliki dayasaing, karena tiga faktor utama (Simatupang, 1995; Irawan, 2003): (1) pada agribisnis yang bersifat dispersal, tidak ada keterkaitan fungsional yang harmonis antara setiap kegiatan agribisnis dengan kegiatan lainnya karena masing-masing pelaku agribisnis mengambil keputusan sendiri-sendiri dalam menjalankan usahanya, konsekuensinya adalah dinamika pasar tidak selalu dapat direspon secara efektif karena tidak adanya koordinasi; (2) terbentuknya margin ganda sehingga ongkos produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil yang harus dibayar konsumen menjadi lebih mahal, sehingga sistem agribisnis berjalan tidak efisien dalam

memenuhi kebutuhan pasar, margin ganda tersebut dapat bersumber dari rantai pemasaran yang panjang dan transmisi harga/informasi pasar yang tidak sempurna kepada petani, ketidaksempurnaan transmisi tersebut umumnya tinggi pada komoditas hortikultura; dan (3) tidak adanya kesetaraan posisi tawar antara petani dengan pelaku agribisnis lainnya, sehingga petani sulit mendapatkan harga pasar yang wajar dan sebagian besar nilai tambah tidak dapat dinikmati oleh petani, konsekuensinya adalah petani sulit melakukan pemupukan modal dan sulit memenuhi tuntutan permintaan atau preferensi konsumen yang terus berubah.

Beberapa hasil studi di tingkat mikro memberikan gambaran bahwa adanya kerjasama usaha antara pelaku agribisnis dapat meningkatkan saling ketergantungan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, seperti pada pengembangan: usaha agribisnis salak pondoh di Kabupaten Sleman, Jawa Tengah; usaha agribisnis nenas di Jambi; usaha agribisnis semangka dan melon di Jembrana, Bali; usaha agribisnis hortikultura di Desa Sajang, Nusa Tenggara Barat; usaha agribisnis komoditas ekspor unggulan di Jateng dan Jatim; usaha agribisnis kentang varietas atlantik di Kecamatan Jangkat, Kabupaten Sarko dan Kecamatan Kayu Aru, Kabupaten Kerinci, Jambi; usaha agribisnis sayuran Watuwisesa, Bali; usaha agribisnis benih kentang, di Pangalengan, Jabar; dan pengembangan usaha agribisnis benih sayuran dataran rendah di Jabar dan Jatim (Ditjenholt, 2001).

Namun, berbagai model pengembangan tersebut baru sebagian yang menerapkan prinsip-prinsip agribisnis sebagai suatu sistem maupun agribisnis sebagai usaha, belum mempertimbangkan pentingnya keseimbangan antara produksi di sentra-sentra produksi dan permintaan pasar di pusat-pusat konsumen, serta belum memperhatikan aspek pengembangan kawasan atau wilayah dan antar wilayah. Secara teoritis, dayasaing (keunggulan kompetitif) suatu komoditas atau kelompok komoditas merupakan determinan dari eksistensi produsen dan pelaku ekonomi lain yang tercakup dalam sistem agribisnis komoditas tersebut. Dayasaing merupakan resultante dari faktor-faktor yang menentukan keunggulan komparatif suatu komoditas dengan faktor-faktor kunci dari dimensi struktur, perilaku dan keragaan pasar komoditas. Oleh karena itu buku yang berjudul "Pemantapan Model Pengembangan Kawasan Agribisnis Sayuran/Hortikultura Sumatera (KASS/KAHS)", diluncurkan sebagai salah satu model pengembangan agribisnis hortikultura dengan pendekatan kawasan.

Tujuan Penulisan

Penulisan buku yang berjudul "Pemantapan Model Pengembangan Kawasan Agribisnis Sayuran Hortikultura Sumatera (KASS/KAHS) ditujukan untuk :

1. Analisis peta permintaan komoditas sayuran di Kawasan Agribisnis Sayuran/Hortikultura Sumatera (KASS/KAHS) menurut segmen pasar.
2. Analisis peta perdagangan sayuran antar wilayah di Kawasan Agribisnis Sayuran/Hortikultura Sumatera.
3. Analisis peta produksi sayuran di Kawasan Agribisnis Sayuran/Hortikultura Sumatera (KASS/KAHS).
4. Merumuskan model kelembagaan di tingkat petani dalam kerangka pengembangan agribisnis sayuran Sumatera.

Mengingat luasnya cakupan dalam judul buku ini yang mencakup aspek peta permintaan, aspek perdagangan, aspek pemetaan produksi, rancang bangun pengembangan agribisnis sayuran, serta pemantapan model kelembagaan di tingkat petani dalam kerangka pengembangan Kawasan Agribisnis Sayuran Sumatera, maka buku ini dituangkan dalam bab per bab dengan tujuan agar pembahasan dapat mengikuti alur yang runtut, lebih fokus, dan memudahkan bagi para pembaca.

KESIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKAN

Kesimpulan

1. Besarnya permintaan komoditas sayuran untuk konsumen rumah tangga sewilayah Sumatera (tanpa Nanggroe Aceh Darussalam) pada tahun 2002 adalah sebesar 1.935,56 ribu ton, dimana pangsa permintaan untuk kentang 7,12 persen, kubis 6,02 persen, cabe merah 6,80 persen, dan tomat 4,66 persen. Berdasarkan kajian kualitatif di lapang diperoleh informasi kualitatif bahwa perkiraan permintaan komoditas sayuran untuk konsumen institusi berkisar antara 5 - 8 persen.
2. Berdasarkan hasil kajian data sekunder dengan basis data SUSENAS tahun 2002 dan data primer dari responden konsumen institusi diperoleh temuan : (1) pangsa permintaan sayuran untuk konsumen rumah tangga adalah dominan; (2) untuk komoditas kentang proporsi permintaan untuk konsumen rumah tangga berkisar antara 92,82 - 99,46 persen dan proporsi untuk konsumen institusi (hotel, restoran/rumah makan, dan rumah sakit) hanya berkisar antara 1,54 - 7,18 persen; (3) sedangkan untuk komoditas kubis berkisar antara 91,34 - 99,46 persen dan proporsi untuk konsumen institusi berkisar antara 0,54 - 8,66 persen; (3) sementara itu, untuk komoditas cabe merah proporsi permintaan untuk konsumen rumah tangga berkisar antara 91,87 - 98,94 persen dan proporsi untuk konsumen institusi berkisar antara 1,06 - 8,13 persen; dan (4) terakhir untuk komoditas tomat, menunjukkan proporsi permintaan untuk konsumen rumah tangga berkisar antara 91,90 - 99,44 persen dan proporsi untuk konsumen institusi berkisar antara 0,56 - 8,10 persen.
3. Sebaran besarnya permintaan konsumen rumah tangga nampaknya sejalan dengan sebaran jumlah penduduk suatu wilayah, namun diperkirakan variabel pendapatan turut berpengaruh. Sementara itu, sebaran besarnya permintaan konsumen institusi sangat terkait dengan perkembangan ekonomi wilayah, pusat perkotaan, pusat ekonomi-industri, serta daerah pariwisata, seperti yang dijumpai di Kota Pekanbaru dan Batam.
4. Pusat-pusat konsumsi sayuran di Sumatera, yang ditunjukkan oleh besarnya pangsa permintaan konsumen rumah tangga (lima terbesar), berturut-turut adalah sebagai berikut: (1) Untuk total sayuran: Medan, Deli Serdang, Palembang, Langkat, dan Lampung Tengah; (2) Untuk komoditas kentang: Medan, Solok, Langkat, Mandailing Natal, dan Deli Serdang; (3) Untuk komoditas kubis: Deli Serdang, Lahat, Bengkulu Utara, Medan, dan Ogan Komering Ulu; (4) Untuk komoditas cabe merah: Medan, Deli Serdang, Padang, Palembang, dan Asahan; (5) Untuk komoditas tomat: Medan, Deli Serdang, Asahan, Simalungun, dan Langkat. Hasil kajian tersebut

menunjukkan bahwa pusat-pusat konsumsi sayuran sebagian besar berada di wilayah Sumatera Utara.

5. Berdasarkan nilai indeks spesialisasi konsumsi suatu komoditas sayuran, daerah-daerah yang memiliki indeks spesialisasi tinggi dalam konsumsi sayuran (lima terbesar) berturut-turut adalah: (1) Untuk komoditas kentang: Kerinci, Solok, Rokan Hilir, Mandailing Natal, dan Tanah Datar; (2) Untuk komoditas kubis: Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Bengkulu Utara, Rokan Hilir, dan Bengkalis; (3) Untuk komoditas cabe merah: Pesisir Selatan, Lima Puluh Koto, Agam, Solok, dan Tanah Datar; dan (4) Untuk komoditas tomat: Toba Samosir, Dairi, Tanjung Balai, Tapanuli Utara, dan Tanah Karo.
6. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebutuhan sayuran untuk kebutuhan hotel kelas bintang, rumah sakit tipe A, B, dan C, serta restoran-restoran besar sebagian besar dipasok oleh supplier langganan yang terpercaya, yang mampu menyediakan sayuran yang memenuhi jenis, jumlah, kualitas atau mutu, dan jaminan ketepatan waktu. Sementara itu, untuk hotel kelas melati, rumah makan sedang-kecil, dan rumah sakit tipe D serta pelayanan kesehatan lainnya kebutuhan sayurannya dipasok oleh pedagang di pasar setempat dengan kualitas standar dengan sistem langganan.
7. Kajian data sekunder dan pendalaman kajian di lapang menunjukkan bahwa peta perdagangan sayuran asal Kawasan KASS/KAHS sebagian besar didistribusikan ke luar daerah (60-70%), dan sekitar 30-40 persen ditujukan untuk pasar masing-masing provinsi penghasil sayuran. Distribusi ke luar daerah ditujukan baik untuk tujuan ekspor ke Singapura dan Malaysia, maupun untuk kebutuhan Provinsi Riau dan Riau Kepulauan (Batam), serta provinsi-provinsi sekitar (Jambi, Aceh, Sumsel), dan secara temporal masuk juga ke pasar Jakarta.
8. Perdagangan sayuran asal Sumatera hingga kini masih memiliki prospek pasar yang cerah untuk tujuan pasar ekspor utama Singapura, baik ditinjau dari tingkat konsumsi masyarakat maupun trend impor yang juga terus meningkat dari waktu ke waktu. Dengan tingkat konsumsi sayuran sebesar 83,4 kg/kapita/tahun dan jumlah penduduk 4,19 juta jiwa, maka total konsumsi untuk sayur-mayur masyarakat Singapura mencapai 349, 4 ribu ton. Dengan tingginya wisatawan yang datang ke Singapura yang diperkirakan mencapai 6 juta pertahun, maka permintaan pasar Singapura diperkirakan menjadi lebih dari dua kali total konsumsi domestiknya.
9. Untuk total luas tanaman sayuran Kabupaten Karo, Rejang Lebong, Simalungun dan Deli Serdang berturut-turut menduduki peringkat 1 sampai 4. Meskipun Kabupaten Karo menduduki peringkat pertama, pertumbuhan luas tanaman sayuran di kabupaten ini hanya 3,3 %/th, jauh di bawah pertumbuhan luas tanaman sayuran di Rejang Lebong (26,6 %/th) dan Simalungun (52,35 %/th). Besar

kemungkinan posisi Karo sebagai daerah sentra produksi utama sayuran akan tergeser oleh Rejang Lebong dan Simalungun. Nampaknya ketersediaan lahan sangat menentukan pertumbuhan luas tanaman sayuran tersebut.

10. Untuk luas tanaman kentang, peringkat 1 sampai 4 berturut-turut diduduki oleh Kabupaten Karo, Simalungun, Kerinci dan Solok. Akan tetapi, pertumbuhan luas tanaman kentang di Kabupaten Karo hanya 2,9 %/th, lebih kecil daripada di Kabupaten Simalungun (3,9 %/th) dan di Kabupaten Kerinci (4,7 %/th). Indeks spesialisasi tanaman kentang di Kabupaten Karo hanya 2,95, sedangkan di Kabupaten Simalungun dan Kerinci berturut-turut 3,89 dan 4,55. Dari segi produktivitas tanaman kentang, Kabupaten Karo menduduki peringkat keempat, sedangkan Kabupaten Kerinci dan Simalungun berturut-turut menduduki peringkat 1 dan 2. Hasil kajian ini juga memperkuat adanya peluang tergesernya Kabupaten Karo sebagai daerah sentra produksi kentang oleh Kabupaten Kerinci dan Simalungun. Kesimpulan ini didukung oleh fakta empiris di lapang, yaitu terjadinya konversi lahan kentang ke komoditas jeruk dan kopi.
11. Kabupaten Karo juga menduduki peringkat pertama dari segi luas tanaman kubis, disusul oleh Kabupaten Rejang Lebong, Simalungun dan Solok. Pertumbuhan luas tanaman kubis di Kabupaten Karo masih cukup tinggi (34 %/th), sedangkan pertumbuhan di tiga kabupaten lainnya adalah negatif. Produktivitas tanaman kubis Kabupaten Karo masih lebih tinggi daripada di Kabupaten Rejang Lebong dan Simalungun, tetapi lebih rendah daripada produktivitas kubis di Kerinci. Nampaknya dalam hal memproduksi kubis posisi Kabupaten Karo tidak tergoyahkan. Untuk meningkatkan dayasaing komoditas ini di pasar ekspor perlu pembenahan dalam hal managemen dan teknologi penanganan pasca panen serta managemen dan teknologi distribusi, termasuk dalam bongkar muat.
12. Tanaman cabe merah lebih menyebar di banyak kabupaten karena memiliki daya adaptasi yang luas. Kabupaten Karo menduduki peringkat pertama dalam pangsa luas tanaman cabe, disusul oleh Kabupaten Rejang Lebong, Deli Serdang dan Simalungun yang memiliki pangsa luas tanaman cabe lebih besar dari 4 persen. Tiga kabupaten (Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara dan Tanah Datar) memiliki pangsa luas tanaman cabe di antara 3-4 persen, 8 kabupaten memiliki pangsa tanaman cabe di antara 2-3 persen, 15 kabupaten memiliki pangsa tanaman cabe di antara 1 - 2 persen dan 46 kabupaten lainnya memiliki pangsa tanaman cabe kurang dari 1 persen. Di keenam kabupaten yang memiliki pangsa luas tanaman cabe lebih besar dari 3 persen, pertumbuhan tanaman cabe yang tertinggi terjadi di Kabupaten Rejang Lebong dan Karo, sedangkan di empat kabupaten lainnya adalah negatif. Dari keenam kabupaten utama penghasil cabe tersebut (Karo, Rejang Lebong, Deli Serdang, Simalungun, Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan) hanya Kabupaten

Deli Serdang dan Tapanuli Selatan yang spesialis untuk tanaman cabe. Produktivitas tanaman cabe tertinggi terjadi di Kabupaten Simalungun dan Karo, masing-masing lebih tinggi dari 7 ton/ha.

13. Seperti dalam kasus tanaman cabe, tanaman tomat juga relatif menyebar di banyak kabupaten karena memiliki daya adaptasi yang luas. Kabupaten Karo menduduki peringkat pertama dalam luas tanaman tomat, kemudian disusul oleh Kabupaten Rejang Lebong, Simalungun dan Tapanuli Utara. Dari segi tingkat pertumbuhan luas tanaman tomat, Kabupaten Rejang Lebong menduduki peringkat pertama, pertumbuhan di Karo tidak nyata, sedangkan pertumbuhan di Kabupaten Simalungun dan Tapanuli Utara bahkan negatif. Semua kabupaten yang memiliki pangsa luas tanaman tomat lebih besar dari 1% terhadap luas tanaman tomat seluruh Sumatera menjadi kabupaten spesialis tanaman tomat kecuali Kabupaten Aceh Utara, Tapanuli Selatan dan Lampung Barat. Dari segi produktivitas, kabupaten Simalungun menduduki peringkat pertama dan disusul oleh Kabupaten Karo, Lampung Selatan dan Aceh Tengah.
14. Lembaga baru yang dicoba ditanamkan di pedesaan adalah KASS/KAHS (Kawasan Agribisnis Sayuran/Hortikultura Sumatera) yang sudah mencakup hampir seluruh wilayah Sumatera. Di Sumatera Utara kelembagaan KASS/KAHS dipusatkan di Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, sementara di Sumatera Barat dipusatkan di Kecamatan IV Angkat Candung dan Kecamatan Candung, Kabupaten Agam. Lembaga ini baru berdiri pada tataran gagasan pada tahun 1998-1999, kemudian dicoba disosialisasikan dan diterapkan pada periode 2000-2004. Hasil kajian menunjukkan bahwa kelembagaan KASS/KAHS belum berjalan seperti yang diharapkan, baik dari aspek struktur maupun tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan.
15. Memantapkan kelembagaan KASS/KAHS tidak dapat hanya dilakukan dengan membangun struktur organisasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, namun perlu merumuskan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian secara terperinci, pentingnya adanya dukungan komitmen dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam pendanaan dan fasilitasi lainnya. Kelembagaan KASS/KAHS akan dapat berjalan apabila tugas pokok dapat dijalankan dengan baik dan dipatuhi semua anggota. Kegiatan awal yang sangat penting dilakukan adalah pendataan tentang peta produksi, peta perdagangan, dan peta permintaan dengan dukungan data yang handal dan akurat.
16. Keterpaduan antar kelembagaan pemerintah, pelaku agribisnis, dan masyarakat petani dalam pengembangan agribisnis di kawasan KASS/KAHS dalam kerangka pengintegrasian antara Program Agropolitan dengan kelembagaan Forum KASS/KAHS menunjukkan masih rendahnya tingkat keterpaduan yang ada, yang antara lain ditunjukkan oleh: (1) kelembagaan komunitas lokal tidak dijadikan

inisiasi awal dalam pembentukan kelompok tani sayuran; (2) masyarakat petani sayuran terhimpit dalam dua struktur pasar, di mana pada pasar input menghadapi struktur pasar yang oligopolistik, sementara itu pada pasar output menghadapi struktur pasar yang oligopsonistik; (3) masih terdapat gap atau missing link antara pengambilan keputusan di tingkat eksekutif dan legislatif di kabupaten dengan permasalahan, potensi dan kebutuhan masyarakat pertanian di tingkat desa; dan (4) Implikasi dari kondisi di atas adalah lemahnya partisipasi masyarakat dan para pelaku agribisnis dalam berbagai program pengembangan agribisnis sayuran.

17. Pemantapan Model Kelembagaan Forum KASS/KAHS Sebagai Lembaga fasilitasi, mediasi, dan sumber rujukan. Berdasarkan peran dan kedudukan kelembagaan Forum KASS/KAHS serta berdasarkan kajian di lapang maka ilustrasi peran dan kedudukan yang perlu dibenahi dalam pemantapan kelembagaan tersebut antara lain adalah: (1) Konsolidasi kelembagaan di tingkat petani dikembangkan; (2) Membangun data base dan sistem informasi sebagai basis pengambilan keputusan; (3) Bagaimana pengoperasian Kelembagaan Forum KASS/KAHS sebagai lembaga fasilitatif, mediasi, dan sumber rujukan; (4) Pentingnya pemahaman terhadap jaringan agribisnis; (5) Sistem koordinasi antar kelembagaan di era otonomi daerah; (6) Pengaturan produksi berdasarkan keseimbangan dengan permintaan pasar; (7) Pentingnya informasi potensi dan persyaratan pasar sayur-sayuran ke Singapura sebagai tujuan ekspor utama.
18. Upaya perbaikan dalam pemantapan model kelembagaan KASS/KAHS dilakukan melalui integrasi dengan Program Agropolitan, sehingga memenuhi empat syarat penggerak pembangunan agribisnis di wilayah KASS/KAHS (SDA-Wilayah KASS, Kapasitas SDM yang memadai, teknologi tepat guna dan kelembagaan), dan karenanya mampu menghasilkan produk sayuran yang berdayasaing. Hal tersebut akan bisa dicapai kalau konsolidasi pada masing-masing kelembagaan dapat dilakukan dengan baik serta adanya sistem koordinasi yang efektif antar kelembagaan (kelompok tani/asosiasi, kelembagaan pelaku agribisnis, kelembagaan pemerintah, serta Forum KASS/KAHS).

Saran Kebijakan

1. Perencanaan pengembangan produksi sayuran atau hortikultura di wilayah KASS/KAHS yang didasarkan atas peta konsumsi, baik untuk rumah tangga maupun konsumen institusi (hotel, restoran/rumah makan, dan rumah sakit) atau potensi pasar dan didasarkan atas peta produksi (potensi sumberdaya alam) dan melalui skala prioritas pengembangan berdasarkan indeks spesialisasi pertanaman. Dengan demikian, dapat didekati keseimbangan antara penawaran

- dan permintaan, sehingga pada akhirnya harga sayuran yang dihasilkan petani relatif stabil.
2. Di samping data dan informasi pemetaan konsumsi, perdagangan, dan produksi, maka kebutuhan mendesak bagi pelaku agribisnis sayuran atau hortikultura di wilayah KASS/KAHS adalah data dan informasi tentang spesifikasi, karakteristik, persyaratan dan standarisasi mutu produk sayuran menurut tujuan pasar (lokal, regional, ekspor) serta segmen pasar (rumah tangga atau konsumen institusi) secara lebih rinci. Dengan demikian di samping keseimbangan pasar dapat dijaga, juga mampu dihasilkan produk sesuai permintaan pasar
 3. Memantapkan kelembagaan KASS/KAHS, baik dalam membangun struktur organisasi (baik di tingkat provinsi maupun kabupaten), maupun merumuskan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian secara terperinci. Penting adanya dukungan komitmen dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam pendanaan dan fasilitasi lainnya. Ke depan Forum KASS/KAHS harus mampu menjembatani terbangunnya kelembagaan kemitraan usaha agribisnis yang mandiri sehingga ketergantungan terhadap pemerintah dapat dikurangi.
 4. Kelembagaan KASS/KAHS akan dapat berjalan apabila: (1) Struktur organisasi terbangun dengan baik melalui proses sosial yang matang; (2) tugas pokok disusun secara baik dan terperinci dan dipatuhi semua anggota; dan (3) Adanya kompatibilitas antara struktur yang dibangun dengan tugas dan fungsi yang harus dijalankan; (4) Berhasil melakukan konsolidasi internal baik dari aspek keanggotaan, kepengurusan, managemen/sistem administrasi, dan permodalan; dan (5) Membangun koordinasi antar kelembagaan (kelompok tani, pelaku agribisnis, pemerintah, dan Forum KASS/KAHS) secara efektif; serta (6) Menyusun perencanaan dalam membangun kelembagaan kemitraan usaha agribisnis yang saling membutuhkan, memperkuat, dan saling menguntungkan.
 5. Perspektif model pengembangan agribisnis sayuran di Kawasan KASS/KAHS ke depan dapat dilakukan dengan pengintegrasian antara kelembagaan KASS/KAHS dengan Program Agropolitan dengan mendudukkan peran dan fungsi kelembagaan komunitas lokal-kelompok tani, kelembagaan ekonomi-pelaku agribisnis, dan kelembagaan pemerintah melalui sistem koordinasi yang harmonis melalui kelembagaan Forum KASS/KAHS.
 6. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan agribisnis sayuran di Kawasan KASS/KAHS dalam kerangka mengisi Program Agropolitan haruslah dilakukan secara terpadu dengan mendudukkan peran dan fungsi kelembagaan komunitas lokal, kelembagaan pasar-ekonomi, dan kelembagaan politik-pemerintah melalui sistem koordinasi yang harmonis melalui pola kemitraan yang saling membutuhkan, mem-

perkuat, dan menguntungkan untuk menghasilkan produk sayuran yang berdayasaing.

7. Membangun perencanaan dan pembangunan pertanian modern terpadu berbasis kelembagaan lokal-kelompok tani, berbasis kelembagaan ekonomi-pelaku agribisnis, serta dengan pendekatan yang integratif dalam kerangka otonomi daerah. Ke depan hubungan aliansi strategis antar kelembagaan tadi di daerah sentra produksi dengan pelaku agribisnis daerah pusat konsumsi, serta dengan buyer di luar negeri dilakukan dengan mediasi kelembagaan Forum KASS/KAHS yang untuk sementara difasilitasi oleh pemerintah.
8. Pentingnya Program Pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan berbagai infrastruktur pemasaran yang telah dibangun (Sub Terminal Agribisnis, Cold Storage, Pasar Pertanian, serta fasilitas pendukung lainnya) dalam kerangka pengintegrasian Forum KASS/KAHS dengan Program Agropolitan, yang mencakup : (1) Kegiatan persiapan teknis bagi beroperasinya infrastruktur pasar tersebut; dan (2) Pelaksanaan kegiatan, merupakan tindak lanjut terhadap kegiatan persiapan teknis.